

Laporan Kinerja

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Lhokseumawe

2023



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, KPKNL Lhokseumawe sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dibuat untuk mengukur kinerja KPKNL Lhokseumawe selama tahun anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lhokseumawe mencapai 114,53% pada tahun 2023. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tersebut terdiri dari *Stakeholder Perspective* 33,75%, *Customer Perspective* 22,65%, *Internal Process Perspective* 28,83%, dan *Learning & Growth Perspective* 29,31%. Capaian tersebut merupakan kontribusi dan kerja keras seluruh pegawai dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Lhokseumawe.

Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Lhokseumawe. Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, kami berharap laporan ini dapat berguna sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja yang telah dicapai sekaligus indikator guna meningkatkan kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Lhokseumawe, 07 Februari 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Novrizal

NIP 19751130 199602 1 002



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe ini disusun sebagai bagian dari perwujudan praktik *good governance*. Perwujudan tersebut merupakan asas akuntabilitas di KPKNL Lhokseumawe bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai laporan pencapaian pelaksanaan program/Rencana Kerja Tahun 2023, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kanwil DJKN Aceh, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada tahun anggaran 2023, dari 9 sasaran strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2023, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan hasil sebesar 114,53% untuk Capaian Nilai Kinerja Organisasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini KPKNL Lhokseumawe yang pada tahun 2023 mendapatkan alokasi dana DIPA sebesar Rp2.185.141.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.013.825.637,00 atau 92,15%.

Berdasarkan pada *Strategy Map Kemenkeu-Three* KPKNL Lhokseumawe tahun 2023, terdapat 9 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan KPKNL Lhokseumawe yang penjabarannya dari masing-masing perspektif sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai sebesar 33,75%;
2. *Customer Persepective* dengan bobot IKU 20% tercapai sebesar 22,65%;
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai 28,83%;
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai 29,31%;

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
1.2 Sumber Daya Manusia.....	3
1.2.1 Berdasarkan Golongan.....	3
1.2.2 Berdasarkan Jabatan Struktural	4
1.2.3 Berdasarkan Pendidikan.....	4
1.2.4 Berdasarkan Jabatan Fungsional	4
1.3 Sarana dan Prasarana	5
1.4 Wilayah Kerja.....	6
BAB II Perencanaan Kinerja.....	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja	9
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja.....	13
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	13
3.2 Realisasi Anggaran	58
Bab 4 Penutup.....	60

BAB I**Pendahuluan****1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh. Tugas KPKNL Lhokseumawe sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2013 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Lhokseumawe menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

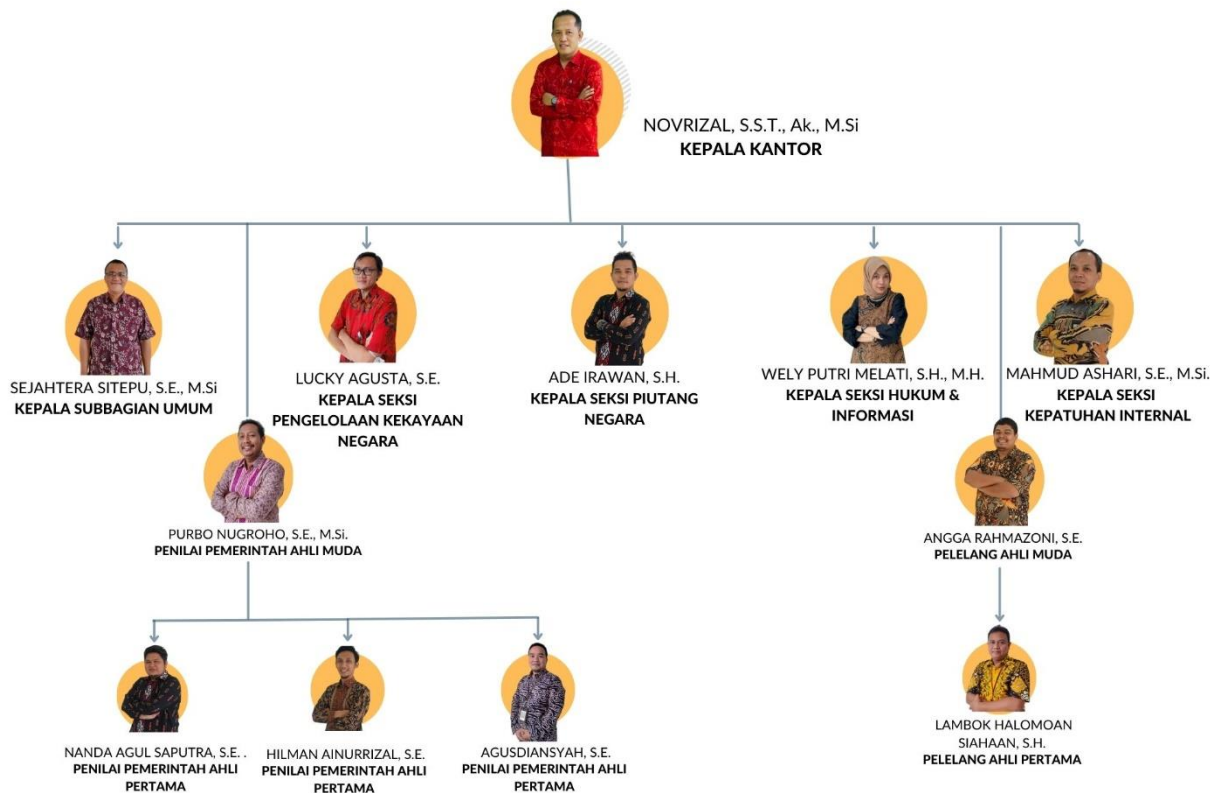
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Lhokseumawe merupakan unit instansi vertikal DJKN terdiri dari satu jabatan struktural eselon III (Kepala Kantor Pelayanan), jabatan eselon IV dan Kelompok Fungsional sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

**Struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Lhokseumawe dapat dilihat pada bagan berikut:**



Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Lhokseumawe periode 31 Desember 2023

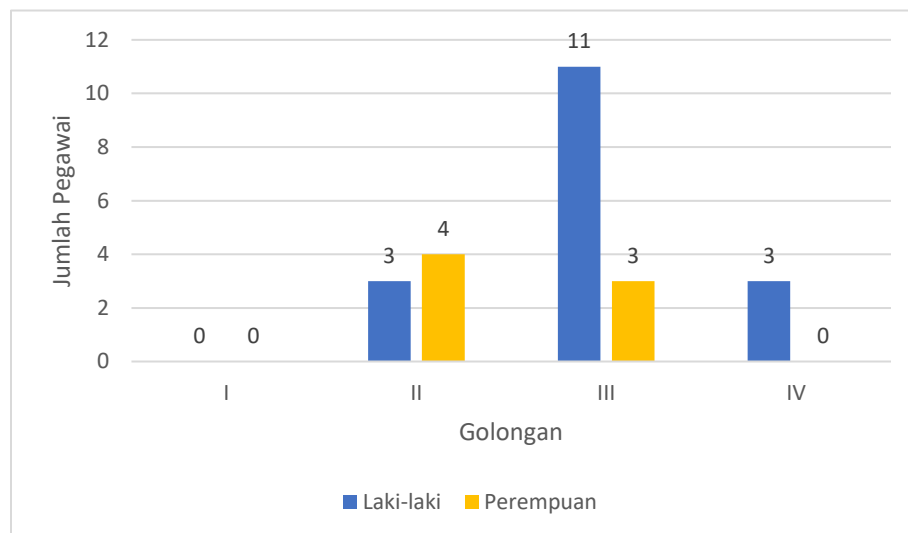
Penjelasan struktur organisasi KPKNL Lhokseumawe:

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Subbagian Umum terdiri dengan 4 (empat) pelaksana, termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dengan 3 (tiga) pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara dengan 1 (satu) pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi dengan 2 (dua) pelaksana;
6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dengan 2 (dua) pelaksana;
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri 4 (empat) Penilai dan 2 (dua) Pelelang.

1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi. KPKNL Lhokseumawe didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang pegawai yang bersinergi dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Berikut komposisi pegawai KPKNL Lhokseumawe yang dirinci berdasarkan golongan, jabatan struktural, Pendidikan, dan Jabatan Fungsional. Berdasarkan Golongan

1.2.1 Berdasarkan Golongan



Gambar 2 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Golongan per 31 Desember 2023

1.2.2 Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 1 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Desember 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Eselon			
			Jafung	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1	-	1	-	-
2	Subbagian Umum	5	-	-	1	4
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	4	-	-	1	3
4	Seksi Piutang Negara	2	-	-	1	1
5	Seksi Hukum dan Informasi	3	-	-	1	2
6	Seksi Kepatuhan Internal	3	-	-	1	2
7	Kelompok Jabatan Fungsional	6	6	-	-	-
Total		24	6	1	5	12

1.2.3 Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	Eselon			
			I	II	III	IV
1	SLTA	-	-	-	-	-
2	D I	1	-	1	-	-
3	D III	3	-	3	-	-
4	D IV / S 1	16	-	3	13	-
5	S 2	4	-	-	1	3
6	S 3	-	-	-	-	-
Total		24	0	7	14	3

1.2.4 Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 3 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pelelang/Pejabat Lelang	2
2	Penilai Kekayaan Negara	4
3	Pranata Keuangan APBN Terampil	0
Total		6

1.3 Sarana dan Prasarana

KPKNL Lhokseumawe beralamat di Jalan T Hamzah Bendahara, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. KPKNL Lhokseumawe berdiri di atas tanah seluas 1.370 m² dan Gedung kantor 2 (dua) lantai dengan total luas bangunan mencapai 1.024 m².

Prasarana kantor terdiri dari area pelayanan dan area bekerja yang dibagi menjadi beberapa ruangan sebagai berikut:

1. Area Parkir;
2. Area Pelayanan Terpadu;
3. Area Kursi Tunggu Pelayanan;
4. Ruang Bermain Anak;
5. Toilet;
6. Ruang Konsultasi;
7. Ruang E-Auction;
8. Ruang Laktasi;
9. Ruang Bendahara Penerimaan;
10. Ruang Rapat;
11. Ruang Sekretaris;
12. Ruang Kepala Kantor;
13. Gudang Arsip PKN, PN, Lelang;
14. Ruang Pelelang;
15. Mushalla;
16. Area Wudhu;
17. Dapur;
18. Ruang PJJ/Ujian;
19. Ruang Server;
20. Area Open Space;
21. Gudang Inventaris;
22. Ruang Bendahara Pengeluaran;
23. Ruang Arsip BKPN;

- 24. Aula;
- 25. Ruang Subbagian Umum;
- 26. Gudang Arsip Umum.

Sarana kantor yang mendukung langsung kegiatan pelayanan terdiri dari:

Tabel 4 Sarana KPKNL Lhokseumawe per 31 Desember 2023

No.	Sarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	4	-	1	5
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	5	-	-	5
3	Laptop	26	-	6	32
4	Komputer	8	1	1	10

1.4 Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe mencakup daerah seluas 27.820 kilometer persegi yang meliputi 2 (dua) Kota dan 8 (delapan) Kabupaten. Adapun Kota dan Kabupaten tersebut sebagai berikut:

- 1. Kota Lhokseumawe;
- 2. Kota Langsa;
- 3. Kabupaten Bireuen;
- 4. Kabupaten Aceh Utara;
- 5. Kabupaten Aceh Timur;
- 6. Kabupaten Aceh Tamiang;
- 7. Kabupaten Bener Meriah;

8. Kabuptaen Aceh Tengah;
9. Kabupaten Gayo Lues;
10. Kabupaten Aceh Tenggara.



Gambar 3 Wilayah Kerja KPKNL Lhokseumawe

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Lhokseumawe merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis KPKNL Lhokseumawe disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Sesuai konsep rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, visi DJKN yaitu: “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai pedoman dan landasan kerja. Oleh karena itu, untuk merealisasikan visi yang ditetapkan maka KPKNL Lhokseumawe memiliki misi yang terdiri dari:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah kekayaan Negara;

- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

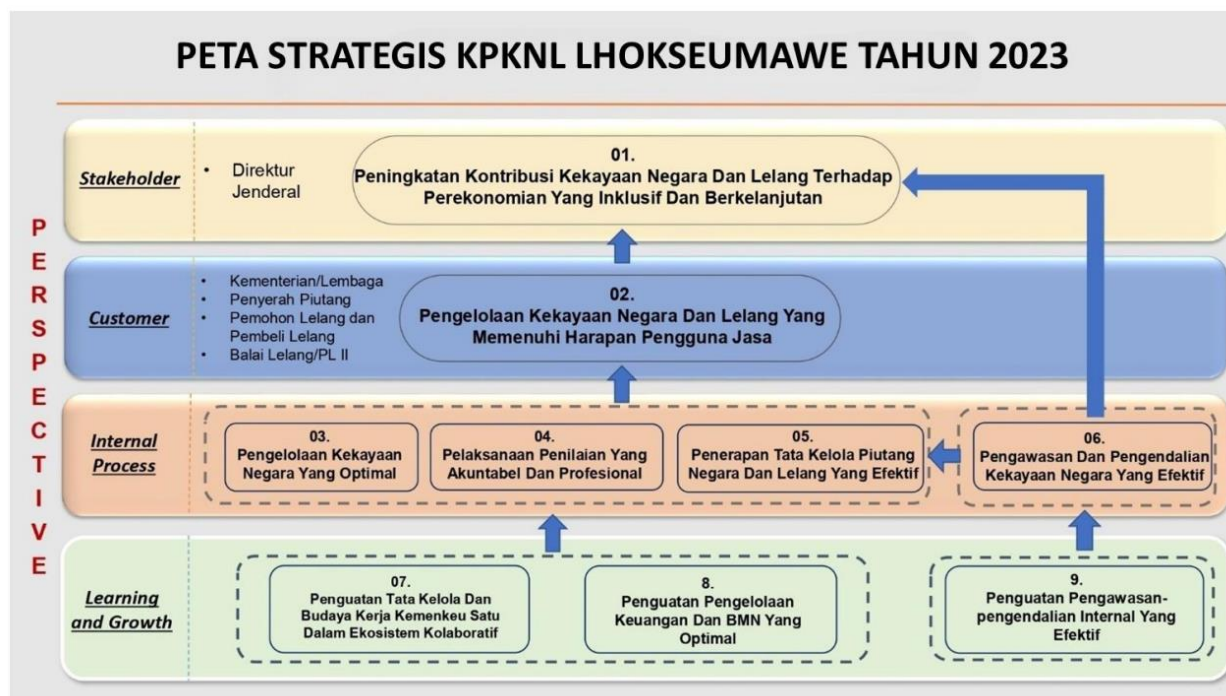
Dalam menjalankan seluruh visi dan misi di atas, senantiasa harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi akuntabilitas, *rule of law* dan transparansi, serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Lhokseumawe untuk periode 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberikan manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



Gambar 4 Peta Strategis KPKNL Lhokseumawe Tahun 2023

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Lhokseumawe harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Lhokseumawe. Sasaran Strategis KPKNL Lhokseumawe Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2023 yang terlihat pada Gambar 4. Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2023 memuat 9 Sasaran Program/Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja. Rincian Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

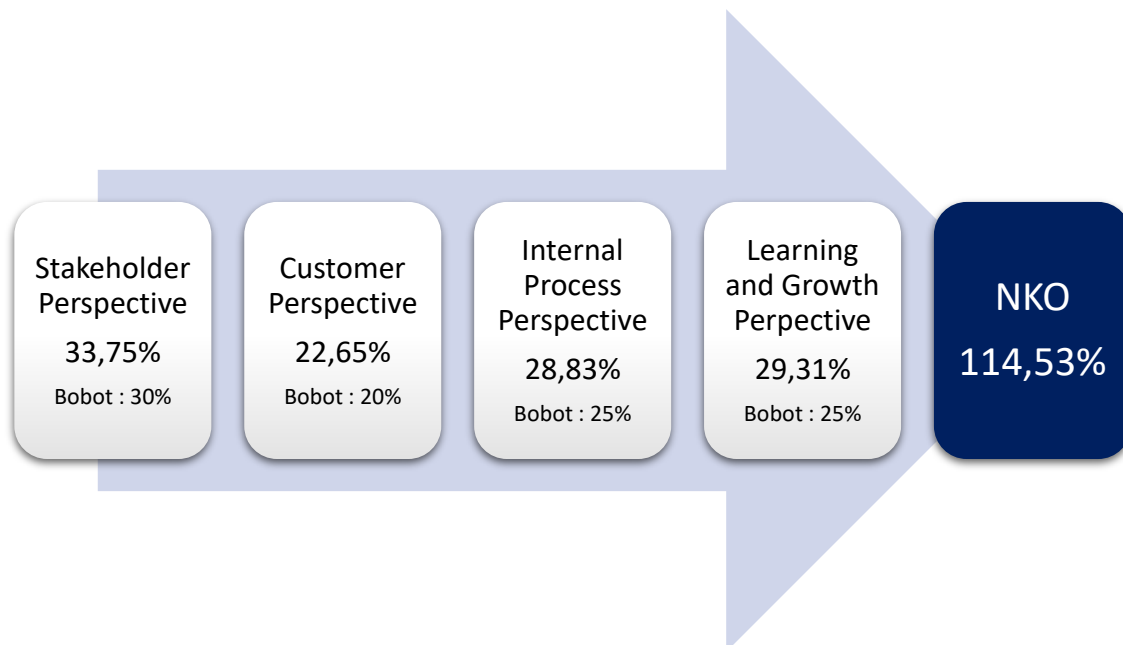
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 KPKNL Lhokseumawe Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68
		3b-CP Presentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100
		3c-CP Presentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90
		5b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15

6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90
		7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
		7c-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
		8c-N Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP Indeks Integritas Organisasi	82,89

BAB III**Akuntabilitas Kinerja****3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lhokseumawe adalah sebesar **114,53%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Capaian Kinerja Tiap Perspektif dan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Lhokseumawe sampai dengan 31 Desember 2023

Selama tahun 2023, seluruh Indikator Kinerja tercapai dan berstatus hijau. Adapun rincian masing-masing capaian sebagai berikut:

Tabel
3.1
Capaian Kinerja KPKNL Lhokseumawe
Tahun 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket
	Stakeholder Perspective(30%)							33.75%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							112.49%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	154.15%	14%	33%	154.15%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80%	86.46%	14%	33%	108.08%	108.08%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas Organisasi	P/M	88.67	97.00	14%	33%	109.39%	109.39%	hijau
	Customer Perspective(20%)							22.65%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							113.23%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	106.45%	14%	50%	106.45%	106.45%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	129.72%	14%	50%	129.72%	120.00%	hijau

	Internal Process Perspective (25%)							28.83%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							115.04%	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	83%	14%	30%	122.27%	120.00%	hijau
3b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	P/L	100%	149.50%	19%	40%	149.50%	120.00%	hijau
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	103.33%	14%	30%	103.33%	103.33%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00%	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	P/M	70%	85.96%	14%	50%	122.81%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							115.56%	
5a-CP	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	P/M	90%	100.00%	14%	50%	111.11%	111.11%	hijau
5b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	15%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							110.75%	
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	98.28%	14%	56%	114.27%	114.27%	hijau

6b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	106.27%	11%	44%	106.27%	106.27%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29.31%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							120.00%	
7a-CP	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	P/M	90%	111.11%	14%	50%	123.46%	120.00%	hijau
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	50%	120.00%	120.00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							118,47%	
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Anggaran	P/M	100%	103.36%	14%	50%	103.36%	103.36%	hijau
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	175%	14%	50%	175.00%	120.00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120.00%	
9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	P/M	60.00	94.61	14%	50%	157.68%	120.00%	hijau
9b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80.00	97.61	14%	50%	122.01%	120.00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114.53%	hijau

Dari capaian kinerja terhadap 20 Indikator Kinerja Kemenkeu *Three* tahun 2023 tersebut, KPKNL Lhokseumawe melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* tahun 2023.

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun, target addendum dan realisasi kinerja tahun 2023. Analisis tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. SASARAN STRATEGIS: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 3 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagai berikut.

1.1 Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- **PNBP BMN**

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara.

- PNBP Piutang Negara (PNBP PN)
Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- PNBP Lelang
Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:
 - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
 - c. biaya permohonan lelang;
 - d. uang jaminan pembeli wanprestasi;
 - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K P
Target	Rp1.159.421.517 (10%)	Rp3.478.264.550 (30%)	Rp3.478.264.550 (30%)	Rp6.956.529.100 (60%)	Rp6.956.529.100 (60%)	Rp11.594.215.166 (100%)	Rp11.594.215.166 (100%)	Max/TLK
Realisasi	Rp858.591.445	Rp6.279.135.046	Rp6.279.135.046	Rp9.378.435.985	Rp9.378.435.985	Rp17.872.346.724	Rp17.872.346.724	
Capaian	7.41%	54.16%	54.16%	80.89%	80.89%	154.15%	154.15%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:**a. Isu Utama dan Implikasi****Isu Utama:**

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya:

- Realisasi PNBP Aset sampai dengan Triwulan IV 2023 sebesar Rp11.521.348.545,00 sudah melebihi target yang ditentukan sebesar Rp7.500.000.000,00;
- Realisasi PNBP Piutang Negara sampai dengan Triwulan IV 2023 sebesar Rp41.155.618,00 melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp28.500.000,00;
- Realisasi PNBP Lelang sampai dengan Triwulan IV 2023 sebesar Rp6.309.842.561,00 melebihi target yang ditentukan sebesar Rp4.065.715.166,00. Hal ini tidak lepas karena adanya kontribusi PNBP Lelang yang berasal dari berupa dua frekuensi lelang bernilai total hampir 80 miliar rupiah.

Implikasi:

- Agar memenuhi target yang berkualitas, terdapat kemungkinan target tahun 2024 akan meningkat, sehingga diperlukan rencana kerja dari seksi PKN, PN, dan Jabatan Fungsional Pelelang serta mendorong agar pemohon mengajukan objek lelang yang *marketable*.

b. Akar Masalah

1. Penetapan target PNBP Pengelolaan Aset tidak berdasarkan potensi riil dari portofolio BMN yg ada pada satker di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, tetapi berdasarkan realisasi periode sebelumnya yang berasal dari hasil lelang barang rampasan Kejaksaan Negeri.
2. Capaian PNBP PN tergantung pada kualitas berkas serta itikad baik dari Debitur dalam melunasi dan mencicil kewajibannya;
3. Objek lelang berupa Barang Tidak Bergerak kurang *marketable*.

c. Tindakan yang Telah dilaksanakan

1. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan satuan kerja terkait penggalian potensi pemanfaatan aset dan tata caranya;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN;
3. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan BMN yang belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang;
4. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitor potensial untuk diikutsertakan dalam *Crash Program* (keringanan utang);
5. Melakukan sosialisasi kepada penyerah piutang melalui surat pos tercatat terkait PMK 11/PMK.06/2022;
6. Melaksanakan lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan pemetaan terhadap aset BMN yang berpotensi untuk dimanfaatkan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja guna penggalian potensi pemanfaatan aset;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN;
4. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitor potensial;
5. Melanjutkan pengurusan piutang negara ke tahap berikutnya;
6. Pelaksanaan kegiatan on the spot dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah yang akan dikunjungi dan dilakukan dengan menggunakan protocol kesehatan;
7. Mengimbau para Pemohon Lelang agar lebih meningkatkan permohonan lelang terutama yang mempunyai potensi laku.

1.2 Persentase Produktivitas Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan. Adapun tujuannya adalah agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	58.67%	67.26%	67.26%	84.46%	84.46%	84.46%	84.46%	
Capaian	58.67%	67.26%	67.26%	84.46%	84.46%	84.46%	84.46%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target

b. Akar Masalah

Tidak ada

c. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d. Rekomendasi Rencana Aksi

Berusaha untuk mengoptimalkan terlaksananya seluruh lelang dalam bentuk lelang internet

1.3 Indeks Integritas Organisasi

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publikd alam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan anti korupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target						88.67	88.67	Max/ TLK
Realisasi						97	97	
Capaian						109.39%	109.39%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya adalah KPKNL Lhokseumawe sebagai unit vertikal DJKN telah melakukan pembangunan pilar-pilar integritas anti korupsi dan gratifikasi. Namun demikian, pihak stakeholder tidak semuanya mempunyai pengetahuan yang sama terkait pembangunan pilar tersebut.

b. Akar Masalah

Minimnya pengetahuan para stakeholder akan pilar-pilar integritas

c. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Peningkatan sosialisasi, diseminasi dan pembangunan integritas di lingkungan internal dan eksternal

d. Rekomendasi Rencana Aksi

Meningkatkan pengetahuan para stakeholder dengan melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan pembangunan integritas di lingkungan internal maupun eksternal

2. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagai berikut:

2.1 Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseu- mawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	Rp31.900.000.000	Rp63.800.000.000	Rp63.800.000.000	Rp111.650.000.000	Rp111.650.000.000	Rp159.500.000.000	Rp159.500.000.000	Max / TLK
Realisasi	Rp3.441.001.802	Rp103.121.955.834	Rp103.121.955.834	156.570.702.238	156.570.702.238	Rp169.792.352.937	Rp169.792.352.937	
Capaian	2.16%	64.65%	64.65%	98.16%	98.16%	106.45%	106.45%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a. Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya banyaknya lelang TAP dan Batal.

Implikasi:

Mempengaruhi pencapaian target pokok lelang.

b. Akar Masalah

Objek Lelang berupa Barang Tidak Bergerak kurang *marketable* yang menyebabkan potensi terjadinya Lelang TAP

c. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

Menghimbau para Pemohon lelang agar lebih meningkatkan permohonan lelang terutama yang mempunyai potensi laku.

2.2 Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

1) Deskripsi Kinerja

Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)

- Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan
- PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan,
- penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	Rp255.000.000	Rp765.000.000	Rp765.000.000	Rp1.530.000.000	Rp1.530.000.000	Rp2.550.000.000	Rp2.550.000.000	Max / TLK
Realisasi	Rp101.866.436	Rp1.047.073.487	Rp1.047.073.487	Rp2.463.279.156	Rp2.463.279.156	Rp3.307.769.740,46	Rp3.307.769.740,46	
Capaian	3.99%	41.06%	41.06%	96.60%	96.60%	129.72%	129.72%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a. Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target

Implikasi:

Tidak ada

b. Akar Masalah

Tidak ada

c. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial untuk diikutsertakan dalam *Crash Program* (keringanan utang).
- Melakukan sosialisasi kepada penyerah piutang melalui surat pos tercatat terkait PMK 11/PMK.06/2022

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial.
- Melanjutkan pengurusan piutang negara ke tahap berikutnya.
- Pelaksanaan kegiatan *on the spot* dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah yang akan dikunjungi dan dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan.

3. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna”.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 3 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagai berikut:

3.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

1) Deskripsi Kinerja

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar.

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target		68%	68%	68%	68%	68%	68%	Max / TLK
Realisasi		50.69%	50.69%	85.52%	85.52%	83.15%	83.15%	
Capaian		74.54%	74.54%	125.76%	125.76%	122.28%	122.28%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya:

- BMN yang menjadi objek pengukuran terletak dipelosok wilayah objek;
- Terdapat BMN yang menjadi objek pengukuran secara fisik sudah tidak eksis;

Implikasi:

- Meningkatkan koordinasi dengan PIC satuan kerja dan melakukan konfirmasi target sebelum periode pelaksanaan pengukuran
2. Akar Masalah
- Satuan kerja tidak melakukan *update* terkait pengelolaan BMN pada SIMAN sehingga mengakibatkan BMN yang sudah dihapuskan tetap menjadi target pengukuran
3. Tindakan yang Telah dilaksanakan
- Melaksanakan koordinasi dengan satker melalui media yang dianjurkan seperti telepon dan aplikasi *WhatsApp*.
4. Rekomendasi Rencana Aksi
- Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat PKKN.
 - Meningkatkan koordinasi dengan satker terkait persiapan pengukuran SBSK yang menjadi target.

3.2 Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

1) Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target		861	861	3.269	3.269	3.269	3.269	Max / TLK
Realisasi		251	251	635	635	4.887	4.887	
Capaian		29.15%	29.15%	19.42%	19.42%	149.50%	149.50%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya:

- Satuan Kerja belum melengkapi berkas sertipikat tanah dan terdapat BMN berupa tanah dengan status bermasalah/sengketa.
- Satuan Kerja tidak melakukan pendampingan pengukuran yang dilaksanakan oleh beberapa kantor pertanahan.

Implikasi:

- Pengukuran yang tertunda menjadikan proses penerbitan sertipikat menjadi terlambat pula.
- Penyerahan berkas dan tindak lanjutnya menjadi terhambat.

2. Akar Masalah

Satuan kerja penerima manfaat memiliki banyak target di beberapa kabupaten sehingga penjadwalan pengukuran menjadi terhambat dan terlambat.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, Kantor Pertanahan, Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat PKKN.
- Melaksanaan hal-hal antisipatif untuk memitigasi risiko tidak tercapainya target sertipikasi BMN berupa tanah.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, Kantor Pertanahan, Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat PKKN.
- Melaksanaan hal-hal antisipatif untuk memitigasi risiko tidak tercapainya target sertipikasi BMN berupa tanah.

3.3 Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

- 1) Deskripsi Kinerja
- 2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	3	9	9	18	18	30	30	Max / TLK
Realisasi	1	12	12	22	22	31	31	
Capaian	3%	40%	40%	73.33%	73.33%	103.33%	103.33%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target

Implikasi:

Tidak ada

2. Akar Masalah

Sejak diserahkan dokumen barang jaminan sebagian besar tidak diketahui keberadaannya, tidak dikuasai oleh penyerah piutang, tidak dilakukan pengikatan, dan barang jaminan tidak *marketable*.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Melakukan konfirmasi keberadaan barang jaminan kepada penyerah piutang.
- *Asset tracing* dengan melakukan pencarian barang jaminan atau harta kekayaan lain ke pihak terkait.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengusahakan terlaksananya penyelesaian BKPN dengan melakukan penagihan dan pemeriksaan debitur di lapangan.

- Optimalisasi barang jaminan yang berhasil diidentifikasi.
- Penelitian lapangan untuk mengetahui keberadaan dan atau kemampuan penanggung hutang.

4. SASARAN STRATEGIS: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut.

4.1 Deviasi Ketergunaan Hasil

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasi nya adalah 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Deviasi Ketergunaan Hasil							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target

2. Akar Masalah

Tidak ada

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan
Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Rekomendasi Rencana Aksi
Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat Penilaian DJKN.

4.2 Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

1) Deskripsi Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/ AVG
Realisasi	84.41%	84.96%	84.96%	85.96%	85.96%	85.96%	85.96%	
Capaian	120.59%	121.37%	121.37%	122.80%	122.80%	122.80%	122.80%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

2. Akar Masalah

Tidak ada

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat Penilaian DJKN

5. SASARAN STRATEGIS: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut.

5.1 Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder sehingga lelang dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, cepat, optimal dan akuntabel.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	Max / TLK
Realisasi Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	
Target Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%	
Realisasi Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	116.28%	116.28%	116.28%	116.28%	116.28%	116.28%	116.28%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target

2. Akar Masalah

Tidak ada

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan lelang (e-Auction).

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Berusaha untuk mewujudkan terlaksananya seluruh pelayanan lelang melalui proses digitalisasi;
- Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat Lelang DJKN.

5.2 Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

1) Deskripsi Kinerja

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari: 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Min/ TLK
Realisasi	6.74%	5.25%	5.25%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	155.07%	165%	165%	199.80%	199.80%	200%	200%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target

2. Akar Masalah

Tidak ada

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Penyetoran PNBPN Lelang sesuai Rincian Uang Hasil Lelang.
- Pencatatan pada FocusPN dan pembayaran dilakukan dengan teliti sehingga meminimalisir selisih.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh

6. SASARAN STRATEGIS: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut.

6.1 Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

1) Deskripsi Kinerja

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

- Sewa (1. Surat perjanjian; 2. SSBP; 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati)

- Kerja Sama Pemanfaatan (1. Surat perjanjian; 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
- Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (1. Surat perjanjian; 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
- Pinjam Pakai (1. Surat perjanjian; 2. Berita acara serah terima)

2. Pemindahtanganan

- Penjualan (1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang; 2. SSBP)
- Tukar Menukar (1. Berita acara serah terima; 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti)
- Hibah (Berita acara serah terima)

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	Max / TLK
Realisasi	45.45%	50%	50%	67.34%	67.34%	98.28%	98.28%	
Capaian	52.85%	58.13%	58.13%	78.19%	78.19%	114.27%	114.27%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya:

Isu Utama:

Satuan Kerja tidak menindaklanjuti persetujuan dan tidak menyampaikan dokumen tindak lanjut atas persetujuan yang sudah diterbitkan oleh Pengelola Barang.

Implikasi:

Berpotensi capaian IKU tersebut tidak tercapai

2. Akar Masalah

Kurangnya pemahaman PIC satuan kerja dalam hal tindak lanjut persetujuan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Menjalin komunikasi dengan PIC Satuan Kerja dalam memperoleh informasi dan dokumen tindak lanjut persetujuan

4. Rekomendasi Rencana Aksi

Melaksanakan asistensi terhadap PIC Satuan Kerja terkait pentingnya tindak lanjut atas penerbitan persetujuan oleh Pengelola Barang.

6.2 Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

1) Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	51/5	51/5	51/5	51/5	51/5	51/5	51/5	Max / TLK
Realisasi	8/1	18/3	18/3	39/4	39/4	55/5	55/5	
Capaian	0.17%	40.24%	40.24%	77.18%	77.18%	106.27%	106.27%	

Adapun analisis kerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

2. Akar Masalah

Tidak ada

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Melakukan pemetaan terhadap BMN target.
- Melaksanakan koordinasi dengan satker melalui media yang dianjurkan seperti telepon dan *WhatsApp*.
- Melaksanakan koordinasi dengan Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN DJKN melalui media yang dianjurkan seperti telepon, aplikasi *WhatsApp & Zoom*.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat PKKN

7. SASARAN STRATEGIS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut:

7.1 Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah

1) Deskripsi Kinerja

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Max / TLK
Realisasi	44.75%	45%	45%	67.5%	67.5%	111.11%	111.11%	
Capaian	49.72%	49.72%	49.72%	75%	75%	123.46%	123.46%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

2. Akar Masalah

Tidak ada

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melaksanakan koordinasi dan menjalin sinergi dengan pihak Satu Kemenkeu wilayah Aceh

4. Rekomendasi Rencana Aksi

Senantiasa menjalin komunikasi dan sinergi dengan pihak Satu Kemenkeu dalam pelaksanaan kegiatan Satu Kemenkeu.

7.2 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

1) Deskripsi Kinerja

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai bertujuan mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	78.26%	95%	95%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	78.26%	95%	95%	120%	120%	120%	120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya:

- Minat para pegawai dalam mengikuti Diklat dikarenakan sampai dengan Triwulan I, pelaksanaan diklat masih dilaksanakan dengan Pelatihan Jarak Jauh.
- Pegawai tidak menginput pembelajaranku di Menu Pembelajaran pada Aplikasi *E-Performance*. Baik itu kompetensi klasikal ataupun non klasikal pada kegiatan DKI per Triwulan, atau
- ketidaksesuaian Kompetensi Klasikal dan Non Klasikal yang dipilih di Menu Pembelajaran saat kegiatan DKI.

Implikasi:

Mempengaruhi capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.

2. Akar Masalah

- Pelaksana dan Pejabat tidak mengambil diklat Klasikal atau Non Menu Pembelajaran saat kegiatan DKI.
- Kurangnya minat Pelaksana dan Pejabat mengikuti diklat Klasikal dikarenakan disaat Pandemi COVID-19, diklat dilaksanakan secara *online*.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Memberikan informasi mengenai Kegiatan *Softcompetency* seperti *E-Learning (Open Access)* kepada seluruh Pegawai KPKNL Lhokseumawe.
- Mengingatkan para pegawai di setiap awal bulannya dalam mengajukan diklat di Aplikasi Diklat.
- Memantau kegiatan DKI untuk mengingatkan pegawai untuk menginput “pembelajaranku” di Menu Pembelajaran.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Memberikan informasi mengenai Kegiatan *Softcompetency* seperti *E-Learning (Open Access)* kepada seluruh Pegawai agar 24 JP dapat tercapai.
- Menginformasikan pengajuan diklat setiap bulannya pada Aplikasi Diklat.
- Mengingatkan atasan dalam melakukan approval terhadap diklat pegawai pada Aplikasi Diklat DJKN.
- Memantau kegiatan DKI untuk mengingatkan pegawai untuk menginput “pembelajaranku” di Menu Pembelajaran.

8. SASARAN STRATEGIS: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut:

8.1 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1) Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target				95.5%	95.5%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	69.71%	95.94%	95.94%	114.40%	114.40%	103.36%	103.36%	
Capaian	69.71%	95.94%	95.94%	114.40%	114.40%	103.36%	103.36%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target seperti sampai dengan triwulan II besaran risiko berada pada level sedang. Walaupun rencana kerja yang dibuat oleh masing-masing seksi telah diupayakan untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan, namun data capaian kinerja pada IKU IKPA masih di angka 69% (merah) dari target tahunan 95,5%.

Implikasi:

Berpotensi capaian IKU tidak tercapai

2. Akar Masalah

Adanya perubahan kebijakan dan struktur anggaran (penambahan/pengurangan)

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Permintaan Rencana Penarikan Dana dan Permintaan Laporan Capaian Output.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Menyampaikan permintaan Rencana Penarikan Dana ke seluruh seksi dan kelompok Jafung
- Menyampaikan nota dinas permintaan Laporan Capaian Output ke seluruh seksi dan kelompok Jafung

8.2 Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

1) Deskripsi Kinerja

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

- Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA),
Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan.
- Persentase Validitas dan Completness Master Aset
Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi.

2. Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan

Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Dalam mendukung capaian ITKP dengan target minimal baik di tahun 2023 maka diperlukan indikator dukungan ITKP yakni Persentase Dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga

tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target				85%	85%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	20%	167%	167%	167%	167%	175%	175%	
Capaian	20%	167%	167%	167%	167%	175%	175%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

2. Akar Masalah
Tidak ada
3. Tindakan yang Telah dilaksanakan
Melaksanakan pengelolaan BMN dan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Rekomendasi Rencana Aksi
Melaksanakan kewajiban pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan IKPA OM-SPAN dengan lebih efektif.

9. SASARAN STRATEGIS: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut.

9.1 Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

1) Deskripsi Kinerja

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni: 1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi, 2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), 3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA), 4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP), 5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS), 6. Penyusunan Profil Pegawai, 7. Penyusunan Simpulan dan LPPI, 8. Jumlah Pengaduan Masyarakat, 9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI 10. Kepuasan Stakeholders, dan 11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target						60%	60%	Max / TLK
Realisasi						94.61%	94.61%	
Capaian						157.68%	157.68%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya Masih terdapat proses bisnis layanan utama yang tidak akurat dan tidak patuh.

2. Akar Masalah

Tingkat *awareness* manajemen lini pertama masih perlu ditingkatkan

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Meningkatkan *awareness* dan kompetensi lini pertama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan norma waktu dengan tetap memperhatikan kepatuhan dan akurasi dari syarat syarat tugas dan fungsi tersebut

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Arahan dari pimpinan untuk mendukung tugas UKI dalam hal pemantauan;
- RPT dan memberikan edukasi kepada manajemen lini pertama sejak dini.

9.2 Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

1) Deskripsi Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

- A. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%) No Komponen Objek Bobot
- | | | |
|-------|---|-------|
| 1 | Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja | 20% |
| 2 | Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja | 25% |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja | 30% |
| 4 | Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik) Perjanjian Kinerja | 25% |
| TOTAL | | 100%. |

- B. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%) No Komponen Objek Bobot 1
 Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 20% 2
 Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 25% 3
 Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 30% 4
 Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik) SKP 25% TOTAL 100% Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut: No Komponen Bobot Triwulan I - III 65% 1 Penyusunan Profil dan Piagam Risiko 20% 2 Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I - III 45% Kegiatan Pendukung 35% 1 Edukasi Manajemen Risiko 30% 2 Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Risiko 5% TOTAL 100% Nilai Predikat 90 = X = 100 Kami mengelola kinerja dengan sangat baik 80 = X < 90 Kami mengelola kinerja dengan baik 70 = X < 80 Kami mengelola kinerja dengan cukup baik 50 = X < 70 Kami mengelola kinerja dengan kurang baik < 50 Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target						80%	80%	Max / TLK
Realisasi						97.61%	97.61%	
Capaian						122.01%	122.01%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

- Dengan diberlakukannya KMK 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di Kementerian Keuangan terdapat pemisahan yang tegas antara pengelola kinerja organisasi dan pengelola kinerja pegawai. Hal ini berimplikasi pada pemisahan capaian organisasi dan capaian masing-masing pegawai. Pemisahan ini juga berimplikasi terhadap belum terakselerasi pada pendokumentasian kelengkapan pengelolaan kinerja.
- Dalam pengelolaan risiko, perumusan risiko dan kejadian risiko belum diformulasikan secara komprehensif

2. Akar Masalah

- Tingkat awareness pegawai dan kapabilitas pengelola kinerja belum optimal

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melaksanakan sosialisasi dan edukasi

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Untuk Pengelola Kinerja organisasi dan pegawai direkomendasikan untuk mengikuti diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya
- Perlunya meningkat frekuensi sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan kinerja dan organisasi.

Tabel 3
Perbandingan Persentase Capaian Kinerja periode 2022 dan 2023

Kode	IKU	Capaian 2022	Kode	IKU	Capaian 2023
	Stakeholder Perspective(25%)	30,00%		Stakeholder Perspective(30%)	33.75%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	120,00%	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	112.49%
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	120,00%	1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	120.00%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	120,00%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	108.08%
	Customer Perspective(15%)	15,94%	1c-CP	Indeks Integritas Organisasi	109.39%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	104,89%		Customer Perspective(20%)	22.65%
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	83,92%	2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	113.23%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	120,00%	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	106.45%
2c-N	Indeks Rata-Rata Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	112,36%	2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	120.00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	107,69%		Internal Process Perspective (25%)	28.83%
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	107,69%	3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	115.04%

	Internal Process Perspective (30%)	33,45%	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	120.00%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	113,41%	3b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	120.00%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	120,00%	3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	103.33%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	111,47%	4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	120.00%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	120,00%	4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	120.00%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100,00%	4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	120.00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	120,00%	5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	115.56%
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	120,00%	5a-CP	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	111.11%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	114,35%	5b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	120.00%
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	108,70%	6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	110.75%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	120,00%	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	114.27%

7	Edukasi yang Efektif	103,38%	6b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	106.27%
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	103,38%		Learning & Growth Perspective (25%)	29.31%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	106,33%	7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	120.00%
	Learning & Growth Perspective (30%)	34,70%	7a-CP	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	120.00%
9	SDM yang Kompeten	120,00%	7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120.00%
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120,00%	8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	118,47%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	118,47%	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Anggaran	103.36%
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	116,94%	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	120.00%
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	108,53%	9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	120.00%
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	97,07%	9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	120.00%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	120,00%	9b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	120.00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		114,09%	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		114.53%

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2023, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.

Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe TA 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	2.088.662.000,00	1.926.085.637,00	92%
Belanja Modal	96.479.000,00	87.740.000,00	91%
Belanja Pegawai	0	0	0%
Total	2.185.141.000,00	2.013.825.637,00	92%

Persentase penyerapan anggaran di KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah sebesar 92% dengan nilai realisasi Rp 2.013.825.637,00. Pada halaman selanjutnya terdapat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Lhokseumawe dari TA 2022 s.d. 2023. Dapat dilihat bahwa dari TA 2022 s.d. 2023 persentase realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan pada sektor belanja barang. Penurunan tersebut terdapat pada belanja pemeliharaan mesin dan peralatan turun 21.96 dari TA 2022 karena kondisi kendaraan operasional yang baik sehingga hanya dilakukan beberapa kali pemeliharaan kendaraan. Selain itu, juga ada penurunan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya berupa mess KPKNL Lhokseumawe karena kondisi mess yang terisi oleh pegawai, sehingga beban pemeliharaan dibebankan pada pegawai yang menempati mess. Sedangkan pada sektor belanja modal mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi TA 2022, hal ini disebabkan oleh kenaikan pada belanja modal TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 karena pada TA 2023 terdapat belanja modal Peralatan dan Mesin pada KPKNL Lhokseumawe berupa Peralatan Fasilitas Perkantoran yaitu brangkas, mesin pompa air, meja kerja, mesin fotokopi, ekstrakomptable, dan kendaraan bermotor.

Sedangkan pada TA 2022 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe TA 2022 dan 2023

	2022	2023		
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	1.930.841.295.00	2.088.662.000,00	1.926.085.637,00	(0.25)
Belanja Modal	0	96.479.000,00	87.740.000,00	100
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Total	1.930.841.295.00	2.185.141.000,00	2.013.825.637,00	4%

BAB IV

Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Lhokseumawe tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Lhokseumawe dalam tahun anggaran 2023 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Lhokseumawe merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Lhokseumawe mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Akhir kata, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi sehingga tercipta akuntabilitas yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan khususnya oleh Pimpinan Kantor Wilayah DJKN Aceh dan Kantor Pusat DJKN. Diharapkan dapat diterima umpan balik yang baik guna peningkatan kinerja sebagai bahan pengambilan kebijakan di masa mendatang.



DJKN

KPKNL
LHOKSEUMAWE

Layanan Informasi



0645-631600



@kpknl_lhokseumawe



@KPKNL_Lhoksm



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe

Layanan Pengaduan



0821 6481 4600

Wise kemenkeu :
wise.kemenkeu.go.idSP4N LAPOR :
wise.lapor.go.id

Dukung kami ...

Dalam mewujudkan Pembangunan
zona Integritas menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani
(ZI-WBBM)



Melayani Amanah Tangap
Akuntabel Bermartabat Bersih
Jujur Terpercaya

"Mantab Berjaya"

